

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran perbankan dalam perekonomian sebuah negara sangat penting. Di Indonesia keberhasilan perekonomian tidak terlepas dari peran perbankan. Dalam hal ini perbankan memegang peranan penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan Nasional, karena dengan pemberian kredit maka akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan sektor ekonomi maupun perdagangan. Dengan pelaksanaan pembangunan Nasional, maka akan dapat membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Perbankan merupakan suatu perusahaan yang memberikan jasa dalam bentuk pelayanan pengelolaan dana nasabah. Setiap perbankan harus mendapatkan kepercayaan dari nasabahnya agar perusahaan dapat beroperasi secara optimal, hal ini dikarenakan dana yang dihimpun dari nasabah merupakan salah satu penerimaan terbesar bagi bank. Maka dari itu perbankan harus memperlihatkan kinerja yang efektif dan efisien. Hal ini dapat dicapai oleh perusahaan dengan menerapkan sistem corporate governance yang baik.

Corporate governance dalam sebuah perusahaan menjadi salah satu hal yang diakui oleh seluruh dunia sebagai sebuah prinsip yang dapat menopang kinerja bank. Kesuksesan penerapan struktur corporate governance dalam sebuah bank dapat meningkatkan akuntabilitas publik, menciptakan nilai, dan meningkatkan efisiensi operasional (*Basel Committee on Banking Supervision* 2010). Namun dari

beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan pengukuran kinerja bank hanya sedikit yang mengukur tentang efisiensi bank itu sendiri.

Dalam penelitian terkait dengan penerapan corporate governance, sebagian besar peneliti tidak menjadikan bank sebagai sampel penelitian (Adams & Mehran, 2012). Namun seiring berjalannya waktu muncul pemikiran yang kuat terkait dengan pentingnya penelitian tentang penerapan corporate governance pada sektor perbankan, karena sebagaimana kita ketahui bahwa sektor perbankan memiliki aturan-aturan yang mengikat sehingga hal ini dapat mempengaruhi perilaku dewan komisaris (Adams dan Mehran, 2012; Salim *et al.*,2016). Sebab dalam penerapan corporate governance diperlukan adanya dewan komisaris yang mempunyai tugas sebagai pengawas manajemen perusahaan dan melindungi kepentingan pemegang saham dengan tujuan agar perusahaan dijalankan oleh manajemen sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku agar tujuan perusahaan dapat dicapai.

Di Indonesia istilah corporate governance mulai dijadikan sebagai topik pembahasan yang penting sejak terjadinya krisis moneter di Indonesia pada tahun 1998. Meskipun sudah hampir 20 tahun berlalu, namun krisis ini masih belum stabil. Dilansir dari media.neliti.com menyatakan bahwa lamanya proses perbaikan ini disebabkan oleh lemahnya penerapan corporate governance (Sunarto, 2012). Rezaee (2009) menjelaskan bahwa terdapat tujuh fungsi esensial dari corporate governance yaitu manajerial, pengawasan, audit eksternal, audit internal, pemantauan, kepatuhan dan advisor.

Menurut Monks & Minow (2004) corporate governance merupakan hubungan yang menjelaskan keterkaitan berbagai pihak yang ada dalam perusahaan yang dapat menentukan kinerja perusahaan tersebut. Apabila penerapan corporate governance dalam sebuah perusahaan lemah, maka hal ini akan memicu timbulnya skandal keuangan pada perusahaan tersebut.

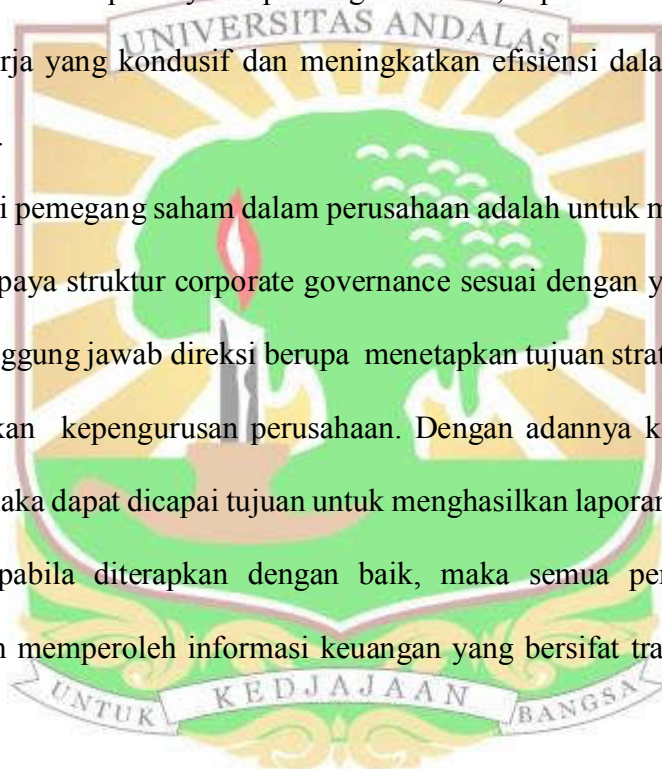
Dilansir dari swa.co.id menyatakan bahwa dalam dunia perbankan sendiri penerapan corporate governance mulai mengalami kemunduran, hal ini berdasarkan kepada riset yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Walaupun dari hasil riset tersebut nilai komposit dari penerapan corporate governance masih berada dalam kisaran baik yaitu dengan nilai 2,02 dari 90 bank yang diteliti, akan tetapi seiring berjalannya waktu nilai tersebut terus mengalami fluktuasi (Rahayu, 2019). Jika corporate governance diterapkan dalam perbankan hal ini dinilai dapat memperbaiki citra perbankan dan untuk melindungi *stakeholder* serta juga dengan tujuan agar pelaku bisnis lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku serta etika umum dalam dunia bisnis. Tentu saja dengan maksud terciptanya sistem perbankan yang baik dan sehat.

Salah satu bukti lemahnya penerapan corporate governance dalam perbankan yaitu adanya kecurangan yang terjadi. Sebagai contoh menurut fakta yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemberitaan media, mengatakan bahwa ada beberapa perusahaan perbankan yang melakukan kecurangan seperti BTN dan Bank Century. Kejadian ini dapat menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank (Ramadhani, 2019).

Dalam rangka melakukan perbaikan terhadap corporate governance perbankan, regulator dalam hal ini pemerintah juga turut membantu dengan cara membuat regulasi melalui bank sentral yaitu Bank Indonesia. Pemerintah membuat peraturan yang dikenal dengan istilah Pakjan atau Paket Kebijakan Perbankan yang dikeluarkan pada tanggal 30 Januari 2006. Salah satu isinya mengatur tentang perbankan harus mampu mengelola resiko kredit demi keberlangsungan bank tersebut. Dengan diterapkannya corporate governance, dapat membantu terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan meningkatkan efisiensi dalam pertumbuhan ekonomi bank.

Peran dari pemegang saham dalam perusahaan adalah untuk menunjuk direksi dan auditor supaya struktur corporate governance sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan tanggung jawab direksi berupa menetapkan tujuan strategis perusahaan dan menjalankan kepengurusan perusahaan. Dengan adanya konsep corporate governance, maka dapat dicapai tujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan. Apabila diterapkan dengan baik, maka semua pengguna laporan keuangan akan memperoleh informasi keuangan yang bersifat transparan (Coyle, 2015).

Bank Indonesia adalah pengawas terhadap bank-bank yang ada di Indonesia, hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank Indonesia terus berupaya agar sistem perbankan Indonesia lebih sehat dan tidak mudah mengalami pailit. Sebagaimana kita ketahui bahwa perbankan memiliki peran yang cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Maka dari itu perlu untuk memperhatikan



kestabilan sistem perbankan tersebut. Peran ini pertama kali dibantu oleh corporate governance. Menurut Otoritas Perbankan Eropa (EBA), kelemahan corporate governance internal perusahaan disebabkan oleh implementasi yang tidak memadai (EBA, 2011).

Banyak penelitian yang dilakukan tentang implementasi corporate governance terhadap kinerja perbankan tujuannya adalah untuk memahami dan memperbaiki corporate governance yang lemah dalam menghindari kebangkrutan (*Basel Committee on Banking Supervision* 2011). Kenapa sangat penting untuk menerapkan corporate governance dalam perusahaan? Hal ini berdasarkan kepada adanya *agency theory*.

Di dalam perusahaan terdapat pemisahan kekuasaan antara pemilik dengan manajemen. Pemilik memberikan kekuasaan pengambilan keputusan kepada manajemen. Tentunya pemilik berharap keputusan yang diambil manajemen sesuai dengan keputusan yang terbaik untuk perusahaan. Ketika manajemen tidak mengambil keputusan yang terbaik untuk perusahaan, maka akan muncul masalah keagenan. Maka dalam rangka mengatasi permasalahan *agency* tersebut, pihak perbankan melakukan pembenahan terhadap sistem corporate governance.

Untuk mencapai corporate governance sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu adanya suatu mekanisme cara kerja yang sistematis untuk memantau terhadap seluruh kebijakan yang diambil. Mekanisme corporate governance termasuk suatu aturan, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap keputusan yang diambil (Walsd & Seward, 1990).

Corporate governance merupakan langkah penting dalam membangun kepercayaan pasar dan mendorong pihak investor untuk melakukan investasi jangka panjang. Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa negara sangat bergantung kepada praktik corporate governance untuk meningkatkan ekonomi sehingga secara keseluruhan meningkatkan kinerja ekonomi (Pintea, 2015).

Pada umumnya penelitian terkait dengan corporate governance yang dihubungkan dengan kinerja perbankan akan diukur dengan *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), atau menggunakan Tobin's Q. Akan tetapi, pengukuran tersebut hanya dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan. Sementara untuk menentukan efisiensi kinerja, maka pengukuran yang dapat digunakan salah satunya adalah *Data Envelopment Analysis* (DEA). Konsep DEA yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis DEA dua tahap yang diusulkan oleh Simar dan Wilson (2007) dengan menggunakan *Variabel Return to Scale* (VSR) untuk menentukan skor inefisiensi bank.

Meskipun sangat banyak penelitian yang membahas tentang corporate governance, namun hanya sedikit penelitian yang berfokus pada bank. Dalam penelitian ini akan berfokus kepada penerapan corporate governance pada perusahaan perbankan dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan perbankan.

Penelitian ini diadopsi dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Salim *et al.*, (2016) sehingga konsep indikator yang digunakan dalam penelitian ini juga berdasarkan kepada penelitian tersebut yang terdiri atas ukuran dewan komisaris, rasio komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat

komite audit, jumlah rapat komite pemantau resiko, dan konsentrasi kepemilikan saham.

Di samping itu juga terdapat lima indikator sebagai variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, kekuatan modal, likuiditas, profitabilitas, dan *time trend*. Akan tetapi, dalam penelitian ini indikator sebagai variabel kontrol yang digunakan hanya empat yaitu ukuran perusahaan, kekuatan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Hal ini dikarenakan indikator *time trend* tidak dapat diterapkan di Indonesia karena adanya perbedaan sistem corporate governance antara Australia dan Indonesia.

Menurut Lukviarman (2016) penerapan corporate governance tidak memiliki suatu sistem yang spesifik yang dapat diterapkan secara universal atau lintas negara. Maka dari itu penerapan corporate governance yang ada di Australia tidak sama persis sama dengan yang diterapkan di Indonesia. Dengan adanya perbedaan tersebut diharapkan adanya upaya pengembangan yang dilakukan baik sistem maupun mekanisme sehingga penerapan corporate governance lebih efisien.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran dewan komisaris, rasio komisaris independen, dan jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perbankan?
2. Apakah jumlah rapat komite audit dan jumlah rapat komite pemantau resiko berpengaruh terhadap kinerja perbankan?
3. Apakah konsentrasi kepemilikan saham berpengaruh terhadap kinerja perbankan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh ukuran dewan komisaris, rasio komisaris independen, dan jumlah rapat dewan komisaris terhadap kinerja perbankan.
2. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh jumlah rapat komite audit dan jumlah rapat komite pemantau resiko terhadap kinerja perbankan.
3. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh konsentrasi kepemilikan saham terhadap kinerja perbankan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait. Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Secara Akademis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya tentang corporate governance. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber literatur untuk melakukan penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penerapan *corporate governance* terhadap kinerja perbankan.

1.4.2 Secara Praktisi

1.4.2.1 Bagi Manajemen Institusi Perbankan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen perbankan.

1.4.2.2 Bagi Nasabah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi nasabah apakah akan mempercayakan dana kepada perbankan.

1.4.2.3 Bagi Pihak Perbankan

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan untuk melihat apakah mekanisme corporate governance sudah diterapkan dengan baik.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut:

Penulisan terdiri atas lima bab, yang terdiri atas bab satu sampai dengan bab lima. Bab satu menjelaskan tentang latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Dalam bab dua dijelaskan terkait dengan landasan teori dan konsep yang dapat memperkuat penelitian serta penelitian terdahulu, kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis.

Untuk bab tiga, dijelaskan terkait dengan metode penelitian yang terdiri atas desain penelitian, populasi dan sampel serta teknik pengambilan sampel, variabel penelitian dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian. Dalam bab empat berisi tentang penjelasan mengenai objek penelitian, pembahasan dan analisis data sesuai dengan alat analisis data yang digunakan. Untuk bab terakhir yaitu bab lima memuat tentang kesimpulan dan saran serta keterbatasan dari penelitian yang dilakukan.

